

DAFTAR PUSTAKA

- Coryana, Isma, 2007, "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparasi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)", Simposium Nasional Akuntansi X , Unhas Makasar.
- Fikri, al , 2010 ,” Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Governmental Organization “ , Simposium Nasional Akuntansi XIII , Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Friedman, Joel. 2003. *Pengembangan SPM bagi Pemerintah Daerah : Senior Urban Policy Advisor USAID.*
- Gunarto. 2010. *Mengukur Kinerja dengan SPM.* Salatiga: UKSW.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta: BPFE
- Jogiyanto. 2004. *Metode Penelitian Bisnis: Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman.* Yogyakarta: BPFE.
- Karyana, Yana. 2004. "Korupsi APBD: Ekses Negatif Otonomi Daerah (Pentingnya Kebijakan Transparansi Pengelolaan Anggaran dalam APBD)". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis.* Vol 8. No 1
- Keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. *Indikator&Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi&Partisipas.* jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan nasional
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2000. *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik.* JAAI. Vol 4. No 1
- Mardiasmo. 2002. *Assessing Accountability of Performance Measurement System and Local Government Budgetary Management.* Gajah Mada International Journal of Business. Vol 4. No 3. pp 373-395
- Nuh, M Fadillah. 2004. *Proses Penyusunan Anggaran & Pengalokasian Belanja di PEMDA Kabupaten Wonogiri.* *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.* Vol 19. No 1. 27-56

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 129/Huk/2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah. Republik Indonesia No.6 Tahun 2008 *tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- Peraturan pertanian Nomor 65 Tahun 2008.
- Soerachmad, Winarno. 1990. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Sularmi dan Agus Endro suwarno.2006. "*Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau Aspek Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*". Vol.5 No1. Hal 28-50
- T, Yeremias Keban. 2005. *Reformasi Orientasi dan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri sipil: Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol 9. No 1
- Triyono.2002. "*Evaluasi Kieran Pemerintah Daerah*". Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 1. No.2. Hal 139-152
- Widyaningsih Aristanti, Trianto, dan Wiyantoro, 2011, " Hubungan Efektifitas Sistem Auntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Intern Laporan Keuangan Seabagai Variabel Intervening", Simposium Nasional Akuntansi XIV , Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
- Wirawan, dan Adi, priyono , 2007 , "Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran ?" Simponium Nasional Akuntansi X , Unhas Makasar.
- Witono, Banu.2002. *Akuntansi Sektor Publik dan akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.1, April 2002.12-23.
- Zulkarnaen. 2008. *Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Pontianak: Magister Ilmu Sosial UNTAN